

DIALEKTIKA ASPEK MULTIKULTURAL DAN GAGASAN POST KOLONIALISME DALAM KONTEKS KEBANGSAAN INDONESIA

Moh. Irmawan Jauhari
STAI-Ma'arif Kendal Ngawi

Abstrak: *Indonesia sebagai bangsa yang multikultural semenjak dahulu menemui beberapa permasalahan yang ada. Karena banyaknya kelompok yang beragam membutuhkan banyak kompromi agar kepentingan yang lebih besar bisa dicapai. Post-kolonialisme menitikberatkan pada hubungan masa lalu antara penjajah dan terjajah tidak terulang kembali, mengingat dewasa ini penjajahan berubah bentuk, berevolusi menjadi semakin halus dan tiada terasa. Proses dialektika antara aspek multikultural dan post-kolonialisme di Indonesia mengalami pasang surut. Mengingat setiap zaman memiliki karakteristiknya masing-masing. Proses tersebut membuat dinamika tersendiri dalam zamannya. Terlebih era globalisasi dewasa ini, dimana sekat budaya menjadi semakin halus dengan semakin terbukanya jalur komunikasi dan informasi.*
Kata kunci: *aspek multikultural, post-kolonialisme, globalisasi.*

Pendahuluan

Masyarakat multikultural atau heterogen, tentu berbeda dengan yang homogen. Dinamika yang ada di dalamnya kemudian juga tidak akan pernah bisa sama. Pada masyarakat multikultural, beberapa permasalahan seperti disintegrasi, stratifikasi sosial yang semakin menyublim, ketegangan budaya, persaingan, perebutan hegemoni, menjadi hal yang wajar ditemui. Namun yang perlu dipertimbangkan juga, pada masyarakat multikultural terdapat beberapa potensi yang bisa dikembangkan, seperti modal sosial yang begitu besar.

Multikulturalisme berasal dari kata *multi* (plural) dan *kultural* (tentang budaya).¹ Multikulturalisme merupakan pengakuan terhadap realitas keragaman kultural. Mencakup keberagaman tradisional seperti suku, ras, agama, maupun bentuk-bentuk kehidupan (subkultur) yang terus bermunculan di setiap tahap sejarah kehidupan masyarakat. Multikulturalisme menekankan keanekaragaman kebudayaan dalam kesederajatan. Multikulturalisme lahir dari benih-benih konsep yang sama dengan demokrasi, supremasi hukum, hak asasi manusia, dan prinsip-prinsip etika dan moral egaliter sosial-politik.

Multikulturalisme adalah kesediaan menerima kelompok lain secara sama sebagai kesatuan, atau menurut Lawrence Blum, sebagaimana dikutip kembali oleh Akhyar Yusuf Lubis, mencakup suatu pemahaman, penghargaan serta penilaian atas budaya seseorang, serta suatu penghormatan dan keingintahuan tentang budaya etnis orang lain.² Tanpa memperdulikan perbedaan budaya, etnik, gender, bahasa, ataupun agama. Multikulturalisme memberikan penegasan bahwa manusia sama di dalam ruang publik. Komunitas-komunitas yang berbeda dengan demikian diperlakukan sama oleh pemerintah.

Postkolonialisme digunakan sebagai alat analisis untuk menggugat praktek-praktek kolonialisme yang masih berlanjut atau kolonialisme bentuk baru yang telah melahirkan kehidupan yang penuh dengan rasisme, hubungan kekuasaan yang tidak seimbang, budaya subaltern, hibriditas yang semuanya dikonstruksikan melalui

¹ <http://mohkusnarto.wordpress.com/masyarakat-multikulturalisme/> (7 Mei 2016)

² Akhyar Yusuf Lubis, *Deskonstruksi Epistemologi Modern*, (Jakarta: Pustaka Indonesia Satu, 2006), 174.



kesadaran atau gagasan.³ Ratna menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan postkolonialisme adalah cara-cara yang digunakan untuk menganalisis berbagai gejala kultural, seperti: sejarah, politik, ekonomi, sastra, dan berbagai dokumen lainnya, yang terjadi di negara-negara bekas koloni Eropa modern. Dengan perkataan lain, postkolonial sebagai alat atau perangkat kritik yang melihat bagaimana sendi-sendi budaya, sosial dan ekonomi yang didalamnya terdapat subjek pascakolonial.⁴

Kehidupan bangsa-negara Indonesia dan sebagian lain, atau yang biasa disebut sebagai Negara Dunia Ketiga, mengalami pertumbuhan yang bisa dibilang cepat dalam masalah infrastruktur. Dewasa ini tidak dapat dipungkiri apabila kemudahan meminjam dari negara maju sebagai modal membangun adalah kewajaran dan kelumrahan. Namun yang perlu dipertimbangkan adalah, percepatan dan pembangunan tersebut turut membentuk watak dan budaya post kolonial. Generasi Indonesia hari ini, atas nama percepatan dan untuk menyambut perdagangan bebas, kemudian menjadi mesin yang harus dipersiapkan menjadi tenaga-tenaga ahli dan terdidik yang bisa dipakai dalam mekanisme perdagangan global. Karakter yang menurun di Indonesia pada generasi muda juga merupakan permasalahan yang serius untuk dipahami.⁵ Bukan semata karena kegagalan dunia pendidikan. Namun lebih dari itu, ide-ide kolonialisme telah berevolusi semakin halus, menjelma dan mengakar dalam dunia dewasa ini. Melalui globalisasi, hutang luar negeri, dan gaya hidup kekinian. Tulisan ini mencoba melihat secara teoritis tentang nilai-nilai multikultural, post kolonialisme, dialektika nilai-nilai multikultural dan post kolonialisme di Indonesia.

Aspek Multikultural

Realitas multikultural di Indonesia dikenal dengan istilah *bhinneka*. Populer digunakan sebagai sebuah kalimat dalam lambang negara yakni *bhinneka tunggal ika*. Berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Hal ini menandakan bila bangsa-negara Indonesia terdiri dari banyak suku dan budaya. Sebuah modal besar yang dapat digunakan untuk membangun dan memperbaiki kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena selain kondisi yang multikultural, Indonesia memiliki potensi SDA yang tidak sedikit.

Teori fungsionalisme struktural ketika dipakai untuk memotret kondisi multikultural yang ada di Indonesia memaparkan beberapa hal penting.⁶ Bahwa proses

³ Abdul Manaf Tubaka, *Islam Lokal Perspektif Historis dan Politik; Memahami Narasi Islam Maluku dalam Konstruksi Postkolonial*. Jurnal Fikratuna Volume 6, Nomor 2, Juli-Desember, 2014.

⁴ Nyoman Kutha Ratna, *Postkolonialisme Indonesia*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar, 2008, 90.

⁵ Thomas Lickona dalam buku *Educating for Character* menjelaskan bila gejala menurunnya moral dan karakter di Amerika menguat tahun 1960n. Dimana pada waktu tersebut industrialisasi mendorong pada terkikisnya nilai-nilai moral, segala sesuatunya dinilai berdasarkan materi, dan menguatnya individualisme. Jika demikian, salah satu kegagalan pendidikan bukan karena masalah dalam dunia pendidikan itu sendiri. Namun problem pendidikan merupakan buah daripada akar utama segala permasalahan. Yakni ekonomi. Thomas Lickona, *Educating for Character*, (Jakarta:Bumi Aksara, 2012), 12.

⁶ Untuk lebih jelasnya teori fungsionalisme struktural bisa lihat, Graham C. Kinloch, *Perkembangan dan Paradigma Utama Teori Sosiologi*, pent Dadang Kahmad, Bandung:Pustaka Setia, 2009. Dan juga, K.J. Veeger, *Realitas Sosial:refleksi filsafat sosial atas hubungan individu-masyarakat dalam cakrawala sejarah sosiologi*, (Jakarta:gramedia Pustaka, 1992).



adaptasi, mencapai tujuan bersama, integrasi, dan juga penanaman Pancasila, sudah dilakukan semenjak dahulu kala. Tidak saja ketika Indonesia merdeka, jauh sebelum itu, para pemuda dengan sumpah pemuda di tahun 1928 juga sudah memiliki mimpi tentang sebuah bangsa-negara yang berdaulat dan integral. Kenyataan multikultural Indonesia jika bisa dipahami dengan baik, justru akan semakin menambah kekuatan adaptasi bangsa-negara ini untuk bersaing di kancah global. Mengingat dengan modal sosial yang besar, tentulah peluang yang ada bisa dimaksimalkan.

Istilah multikulturalisme pertama kali muncul di Kanada dan Australia, baru Amerika Inggris, Jerman, dan lainnya.⁷ Di negara ini kebudayaannya didominasi oleh kaum imigran putih dengan budaya WASP, yaitu kebudayaan putih (*White*), dari bangsa yang berbahasa Inggris (Anglo Saxon), dan yang beragama Protestan. Nilai-nilai WASP inilah yang menguasai mainstream kebudayaan di Amerika Serikat.⁸ Dengan demikian, terjadilah segregasi dan diskriminasi bukan hanya dalam bidang ras tetapi juga dalam bidang agama, budaya dan gaya hidup. Kelompok yang paling didiskriminasi adalah kelompok Afrika-Amerika. Politik diskriminasi tersebut berlaku pada kelompok non-WASP, yaitu kelompok Indian (*Native America*), kelompok Chicano (dari Negara-Negara latin

Tilaar membedakan pengertian multikulturalisme menjadi dua, yaitu:⁹ *Pertama*, multikultural tradisional yang disebut sebagai gelombang pertama multikulturalisme. Pengertian tradisional menyatakan bahwa multikulturalisme mempunyai dua ciri utama, yaitu: 1) Kebutuhan terhadap pengakuan (*the need of recognition*); 2) Legitimasi keragaman budaya atau pluralism budaya. *Kedua*, multikulturalisme baru yang telah menampung berbagai jenis pemikiran seperti pengaruh studi kultural, post-kolonialisme, globalisasi, feminisme, dan post-feminisme, teori ekonomi politik neo-marxisme, dan post-strukturalisme. Dari pengaruh tersebut diatas, multikulturalisme menghadapi tiga tantangan besar yaitu; hegemoni barat dalam bidang ekonomi, politik, dan ilmu pengetahuan; esensialisme budaya dan proses globalisasi.

Bentuk multikultural menurut Mc Cormick, sebagaimana dikutip kembali oleh Tholhah Hasan, ada empat,¹⁰ *Pertama, melting pot*. Adalah sebuah bentuk multikultural yang mana seluruh elemen yang ada melebur menjadi satu. Tidak ada budaya suku yang

⁷ Muhammad Tholchah Hasan, Pendidikan Multikultural sebagai opsi penanggulangan radikalisme,...., 20

⁸ Gerakan multikultural pada awalnya merupakan pengembangan dari strategi interkultural. Bermaksud mengetahui dan mempelajari kebudayaan lain. Di dunia Barat, ada alasan politis yang menyebabkan mengapa gerakan multikultural dalam pendidikan bisa melejit. Salah satunya adalah kontrol sosial bagi warga yang beraneka ragam. Mengingat di Amerika ada imigran gelap juga. Alasan lain adalah, pengalaman panjang dalam kehidupan bernegara di Amerika yang di periode awal dan pertengahan ditandai dengan perang sipil, turut mempengaruhi gagasan multikulturalisme itu sendiri. M. Ainul Yaqin, Pendidikan Multikultural Cross-Cultural Understanding untuk Demokrasi dan Keadilan,...., 23-24.

⁹ H.A.R. Tilaar, "introduksi", dalam Multikulturalisme Tantangan-tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional, (Jakarta:Grasindo, 2002), xx

¹⁰ Muhammad Tholhah Hasan, Pendidikan Multikultural Sebagai Opsi Penanggulangan Radikalisme, (Malang:Unisma Press, 2016), 11.



dominan. Karena semua melebur menjadi satu. Berganti sebuah identitas budaya yang baru. *Kedua, asimilasi*. Adalah keadaan multikultural yang lebih menonjolkan sebuah kelompok paling kuat yang bisa bertahan dan memiliki sebuah budaya yang unggul. Kelompok minoritas secara perlahan akan tersingkir. Budaya mereka, atau kaum minoritas, dikalahkan oleh mayoritas karena beberapa hal. *Ketiga, salad bowl*. Hampir sama dengan konteks bhinneka tunggal ika. Meskipun banyak unsur budaya, namun semuanya tetap ada dan bisa berdampingan. Keragaman budaya dipelihara dan diwariskan. Tidak ada sebuah unsur budaya paling dominan. *Keempat, open nation*. Bentuk yang lebih liberal. Hampir tidak ada batasan yang bisa ditemukan untuk menggaris sebuah bentuk budaya yang ada. Dalam model ini, kerap terjadi akulturasi, sinkretisme. Sehingga kerap hadir bentuk-bentuk budaya baru mengingat sangat longgarnya pengertian model ini.

Menurut Bhiku Parekh, dalam Tholhah Hasan, ada lima jenis multikultural, yakni¹¹ *Pertama, isolationic multiculturalism*. Berbagai kelompok menjalankan hidup secara otonom. Masing-masing kelompok menghormati dan menghargai kelompok lain. Mereka dapat hidup bersama sekaligus mempertahankan budaya masing-masing. *Kedua, acomodative multiculturalism*. Ada sebuah budaya yang dominan dan minoritas. Namun baik yang dominan maupun minoritas bisa hidup berdampingan tanpa ada masalah besar yang dapat menimbulkan gejolak. Karena terdapat kesepahaman dan kesatuan visi misi. Hal tersebut diterapkan dalam pembentukan UU secara bersama. *Ketiga, otonomic multiculturalism*. Adanya kesamaan, kesetaraan dalam masyarakat multikultural. Tidak ada yang dominan. Bahkan ketika ada sebuah kelompok yang menjadi dominan, semuanya menentang. Karena yang penting dari model ini adalah kesetaraan setiap kelompok yang ada dalam sebuah komunitas. *Keempat, critical multiculturalism*. Adanya sebuah identitas bersama yang coba digagas tanpa mereduksi kelompok-kelompok minoritas. Dari pemahaman ini akan didapat bahwa terjadinya dialektika antara kelas dominan dengan sub-ordinat. Meski mendukung sebuah identitas bersama, namun tetap dibutuhkan sebuah pengakuan akan identitas sebuah kelompok sebagai pembeda dari yang lain. *Kelima, cosmopolitan multiculturalism*. Sebuah bentuk multikultural yang lebih berusaha untuk menghapus batas-batas identitas masing-masing kelompok yang ada agar membaaur menjadi satu. Adanya akulturasi yang berlebihan ini dipandang perlu mengingat pentingnya peleburan budaya agar terjadi sebuah kesepahaman bersama dalam masyarakat multikultural.

Multikultural memiliki beberapa aspek. Menurut Tolhah Hasan ada tiga,¹² *Pertama* aspek rasionalitas. Yakni pentingnya pemahaman mengenai multikulturalisme dalam membentuk dan atau membangun kehidupan berbangsa bernegara terutama bagi negara-negara yang mempunyai kemiripan atau kesamaan aneka ragam budaya masyarakat seperti Indonesia. *Kedua*, bahwa ditengarai terjadinya konflik sosial yang bernuansa SARA yang melanda negeri ini pada dasawarsa terakhir erat dengan masalah

¹¹ Muhammad Tholhah Hasan, Pendidikan Multikultural Sebagai Opsi Penanggulangan Radikalisme, ..., 11-12.

¹² Tholchah Hasan, Pendidikan Multikultural sebagai opsi penanggulangan radikalisme, ..., 17-20



kultur atau ketidaksiapan sebagian elemen masyarakat dalam mengadaptasikan dirinya terhadap keragaman kultural. *Ketiga*, bahwa pemahaman terhadap multikulturalisme merupakan kebutuhan bagi manusia untuk menghadapi atau menjawab tantangan global di masa mendatang.

Tiga aspek multikultural menurut St Nugroho adalah, pertama, manusia tumbuh dan besar dalam masyarakat yang memiliki tatanan ada dan budaya tertentu. Dalam hal ini maka masyarakat mengorganisasikan kehidupan dan hubungan sosial dalam suatu tatanan tertentu dimana sistem nilai dan makna diterapkan dalam berbagai ungkapan dan simbol budaya. Kedua, kebudayaan yang beraneka ragam dan berbeda-beda memperlihatkan adanya visi dan sistem makna yang berbeda-beda pula tentang kehidupan. Ketiga, setiap kebudayaan secara internal majemuk dan mencerminkan selalu terjadinya dialog berkelanjutan antara berbagai tradisi yang berbeda.¹³

Zakiyudin Baidawi menyebutkan tiga aspek dalam multikultural.¹⁴ *Pertama* membangun sikap saling percaya (*mutual trust*). Sikap saling percaya penting dibangun dalam kehidupan yang multikultural. Mengingat dalam masyarakat yang majemuk, ada banyak warna agama, budaya, suku bangsa, dan ideologi. Tanpa adanya sikap saling percaya, tentulah kerjasama dalam rangka membangun masyarakat yang lebih baik menemui beberapa halangan. Meskipun pengalaman sejarah memberikan fakta bahwa ada banyak gejolak internal sebagai akibat persaingan sesama anak bangsa, namun untuk membangun sebuah budaya baru, siapapun wajib untuk memberikan rasa percaya kepada saudara sebangsa. Hanya dengan memberikan rasa percaya, kehidupan yang multikultural dapat dibangun.

Kedua memahami konsep saling pengertian (*mutual understanding*). Saling pengertian juga merupakan aspek penting dalam kehidupan multikultural. Saling pengertian pada dasarnya mencoba membekali setiap anak bangsa agar dapat mengerti dan memahami bahwa kemajemukan adalah sebuah hal lumrah yang tidak perlu untuk dibesar-besarkan. Bahkan akan lebih baik jika kemajemukan dimanfaatkan untuk membangun bangsa dan negara. Apabila sikap saling pengertian ini diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, tentu pondasi multikultural akan semakin kuat.

Ketiga menjunjung sikap saling menghargai (*mutual respect*). Saling menghargai adalah bentuk pengakuan kita akan entitas bangsa yang lain. Sikap saling menghormati penting dilakukan dalam kehidupan yang multikultural mengingat dengan sikap saling menghormati, kita akan mendapatkan sebuah pengakuan dan penghargaan dari kelompok lain. Ditambah, dengan adanya sikap saling menghormati, maka kondisi yang multikultural dapat dijaga. Setidaknya apabila ada konflik, dicari akar permasalahannya

¹³ St. Nugroho, "Multikulturalisme", dalam Andre Ata Uja, Multikulturalisme: Belajar Hidup Bersama dalam Perbedaan, ..., 15.

¹⁴ Ada tujuh aspek dalam buku Zakiyudin Baidawai terkait aspek Multikulturalisme, yaitu belajar hidup dalam perbedaan, membangun saling percaya, memelihara saling pengertian, menjunjung sikap saling menghargai, terbuka dalam berpikir, apresiasi dan interdependensi, resolusi konflik dan kerukunan. Zakiyudin Baidawi, Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural, ..., 75-84.



secara bersama-sama, mencoba dialog dalam rangka mencari pemecahan masalah, serta mencegah agar peristiwa tersebut tidak terulang. Dan semua rangkaian itu tidak akan terjadi tanpa adanya sikap saling menghormati.

Post -Kolonialisme

Post-kolonialisme secara umum dikenal sebagai paham yang muncul setelah zaman kolonial. Secara epistemologi, post-kolonial berasal dari kata *post* dan kolonial, sedangkan kata kolonial itu sendiri berasal dari akar kata *colonia*, bahasa Romawi, yang berarti tanah pertanian atau pemukiman.¹⁵ Post-kolonial adalah teori yang digunakan untuk menganalisis berbagai gejala kultural, seperti sejarah, politik, ekonomi, sastra, dan sebagainya. Post-kolonialisme adalah teori yang berasumsi perbedaan antara negara yang terjajah dan menjajah dalam menyikapi perkembangan kebudayaan.¹⁶ Studi post-kolonial dimaknai sebagai suatu perlawanan terhadap dominasi kolonialisme dan warisan kolonialisme. Pada masa era globalisasi harus diakui telah membawa pengaruh yang luar biasa terhadap perkembangan teknologi, tak terkecuali bagi industri komunikasi modern.

*Post kolonial theory is an area of literary criticism and cultural studies that has come into being in response to (a) the post-war upsurge in literary creativity in countries formerly under colonial rule, (b) the persistence of colonial, 'neo-colonial' or imperialist influence in modern world, and (c) by analogy, the use of term such as 'post-structuralist' and 'postmodern' to generate a challenge to monolithic or universalist claims.*¹⁷

Post-kolonial bisa disederhanakan sebagai kritik lintas budaya sekaligus wacana yang ditimbulkannya. Tema yang dikaji juga luas dan beragam, meliputi kebudayaan, politik, agama, pendidikan, sejarah, antropologi, ekonomi, kesenian, etnisitas, bahasa, dan sastra, sekaligus bentuk praktik di lapangan. Seperti perbudakan, pendudukan, pemaksaan bahasa dan berbagai bentuk invasi lainnya. Keberagaman permasalahan di atas dapat disatukan oleh tema yang sama yaitu kolonialisme.

Dua tipe kolonialisme-imperialisme yang perlu dipahami adalah, *pertama*, berhubungan dengan penaklukan fisik. *Kedua* penaklukan pikiran, jiwa, dan budaya. Tan Malaka membagi bentuk imperialisme menjadi empat. Imperialisme biadab, yakni menghancurkan sekalian kekuasaan politik bumiputera dan menjalankan pemerintahan yang sewenang-wenang, misalnya adalah Spanyol di Filipina. Imperialisme autokratis, hampir tak ada beda dengan imperialisme biadab, contohnya Belanda. Imperialisme liberal, yakni imperialisme yang memberikan kekuasaan yang sangat terbatas kepada bumiputera yang berkuasa, seperti Inggris di India. Dan imperialisme liberal, yakni imperialisme yang memberikan kemerdekaan sepenuhnya kepada tuan tanah yang besar serta kepada borjuasi bumiputera yang mulai naik. Misalnya Amerika di Filipina.¹⁸

¹⁵ Nyoman Kutha Ratna, Postkolonialisme Indonesia,....., 205.

¹⁶ Alfa Sayyidah, Postkolonialisme, dalam, <http://alfasayyidah.postkolonialisme.makalah.http>, diakses Januari 2018.

¹⁷ Dennis Walder, A Handbook to Literary Research. France: The Open University. 2005, 157

¹⁸ Tan Malaka, Menuju Merdeka 100%, (Jakarta: Narasi, 2014), 26



Semua jenis kolonialisme dan imperialisme tidak ada yang enak bagi kaum terjajah. Mengingat kebebasan mereka akan dibatasi oleh kepentingan kaum penjajah yang lebih besar. Kaum terjajah tidak dapat mengatur dirinya, mengingat mereka harus mendahulukan kepentingan kaum penjajah yang telah menguasainya. Baik secara fisik maupun pikiran. Kaum penjajah dari jenis kolonialisme-imperialisme kedua, pada tahap selanjutnya akan menjadi kelompok determinan, atau dalam bahasa Gramsci menjadi kelas hegemonik. Kelas hegemonik atau kelompok kelas hegemonik adalah kelas yang mendapatkan persetujuan dari kekuatan dan kelas sosial lain dengan cara menciptakan dan mempertahankan sistem aliansi melalui perjuangan politik dan ideologis.¹⁹ Perbedaan yang cukup signifikan dari kelas determinan dan kelas hegemonik adalah, jika kelas determinan akan sangat terlihat menonjol dan berbeda dengan kelompok lain yang dikalahkannya.²⁰ Sedangkan kelas hegemonik tidaklah demikian, karena perjuangan untuk mengalahkan lawan dilakukan dengan cara-cara lunak dan halus. Pada hakikatnya, hegemoni merupakan upaya untuk menggiring orang agar menilai dan memandang problematika sosial dalam kerangka yang ditentukan.²¹ Hal mana terjadi ketika politik etis digulirkan di Indonesia pada tahun 1900n.

Kolonialisme dalam era manapun memang selalu bergerak pada dua hal. Pertama, menguntungkan si penjajah, terutama pada bidang-bidang tertentu. Kedua, menguntungkan kedua-duanya, karena si terjajah dapat belajar banyak tentang budaya dan kehidupan. Kedua hal tersebut telah menyisakan pengalaman kultural yang luar biasa. Apalagi, jika penjajah telah sampai menanamkan imperialismenya, tentu kolonialisme semakin rumit. Pada tataran ideologis tentu akan lebih berbahaya dalam kehidupan terjajah. Akibatnya, kehidupan si terjajah secara tak sadar akan mengikuti kehendak penjajah.

Dua kunci post-kolonialisme tentang budaya: *Pertama*, dominasi-subordinasi. Isu dominasi dan subordinasi muncul berkenaan dengan kontrol militer kolonial dan keterbelakangan ekonomi. Sub-ordinasi bisa juga disebut sebagai sub-altern.²² *Kedua*, hibriditas dan kreolisasi. Budaya lama di era kolonial, melalui proses hibriditas akan

¹⁹ Roger Simon, *Gagasan-Gagasan Politik Gramsci*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 1999), 22

²⁰ K.J. Veeger, *Realitas Sosial:refleksi filsafat sosial atas hubungan individu-masyarakat dalam cakrawala sejarah sosiologi*,....., 58.

²¹ Nezar Patria dan Andi Arif, *Negara dan Hegemoni*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 1999), 121.

²² Istilah subaltern pada asalnya bermaksud perwira di bawah kapten, kemudian berkembang kepada makna orang tertindas, deskripsi tentang pelbagai kelompok yang didominasi dan dieksploitasi serta kurang memiliki kesadaran kelas, lihat Amir Jeniri. 2007. Menonjolkan suara golongan terpinggir : 27, atau Istilah subaltern lebih sering disebut dan mulai berkembang sejak Gayatri Chakravorty Spivak, perempuan India, profesor di Universitas Pittsburgh, mempublikasikan tulisannya "Can the Subaltern Speak? Speculations on Widow-Sacrifice" (Dapatkah Subaltern Berbicara? Spekulasi-spekulasi tentang Bunuh Diri Janda) di jurnal *Wedge*. Melalui studinya tentang bunuh diri janda di India (*sati*), tulisan itu di kemudian hari menjadi sangat berpengaruh di kalangan intelektual pascakolonial tentang tendensi-tendensi kolonial dalam teori-teori pascakolonial, <http://kunci.or.id/articles/intelektual-gagasan-subaltern-dan-perubahan-sosial-oleh-antariksa/>



semakin pudar. Bahasa juga akan mengalami kreolisasi, yaitu ke arah penciptaan bentuk-bentuk ekspresi baru. Budaya kolonial akan diubah (transkultural) ke dalam wacana hidup baru. Identitas budaya yang konon selalu dianggap halus dan agung (adiluhung), kemungkinan besar segera bergeser maknanya.

Globalisasi dewasa ini, dengan ditandai percepatan di wilayah informasi, telah memoles budaya lama ke dalam budaya baru. Kekuatan paternal dan pusat, lama-kelamaan berubah ke pinggiran. Mitos misalnya, akan berubah sembilan puluh derajat. Bukan sesuatu yang memiliki nilai tawar dan mengandung makna magis. Namun sekedar cerita bagi anak-anak masa kini. Karena pergeseran nilai akhirnya turut membentuk budaya yang ada. Dan yang paling diuntungkan adalah pemilik modal yang mampu mengkonstruksikan ide-ide mereka dalam media elektronik dewasa ini. Misalnya adalah, iklan *hand phone* maupun otomotif yang terus memamerkan produk baru padahal perubahan spesifikasi hanya sedikit. Dan atas nama gaya hidup modern, mereka mengkonstruksikannya menjadi seolah-olah, *hand phone* dan otomotif merupakan kebutuhan siapapun untuk tetap eksis di era global.

Kolonialisme-imperialisme semakin pelik dalam balutan modal asing.²³ Dunia dikonstruksikan pada satu budaya, satu kebutuhan, satu gaya hidup, dan semua serba tunggal. Meskipun liberalisasi pasar menyuguhkan tawaran yang beraneka ragam, namun pada hakikatnya, hanya satu yang menang. Pemodal, penjajah, melalui penciptaan gaya hidup yang mengarah pada konsumerisme. Terlebih, penjajahan teknologi informasi, kultural, dan politik, menyisakan pengalaman pahit bagi kelompok minoritas (dalam artian tidak memiliki modal dan akses teknologi). Misalkan saja, ketika isu teror ditiupkan Amerika kepada kelompok Taliban yang diindikasikan sebagai kaum fundamental dan radikal.

Dialektika Aspek Multikultural dan Post Kolonialisme di Indonesia

Indonesia mengalami masa penjajahan yang terbilang cukup panjang dan melelahkan. Bangsa Eropa berebut kekuasaan di Nusantara mengingat potensi besar yang dimiliki negara dengan keragaman yang majemuk dan penuh dengan SDA. Masa penjajahan fisik selama lebih kurang 350th merupakan bukti bila pada satu sisi, bangsa-negara Indonesia lahan empuk dalam menancapkan kuku imperialisme. Sekaligus sebuah kenyataan bahwa keragaman yang ada, realitas multikultural di Nusantara dimanfaatkan dengan baik.

²³ Lynn H. Miller menulis bila, Rezim ekonomi internasional yang muncul setelah perang dunia II sebenarnya tidak secara persis mencurahkan perhatian untuk menangani persoalan-persoalan yang dihadapi oleh apa yang kemudian disebut sebagai negara dunia ketiga, dengan warisan kemiskinan dan kurangnya perkembangan serta dampak ikutannya yang berupa kesenjangan yang kian melebar dari kesejahteraan hidup diantara penduduknya yang luar biasa besar dengan kondisi negara utara yang trus menumpuk kekayaannya. Tetapi sebaliknya, sistem internasional tersebut dibangun diatas beberapa asumsi umum, seringkali lebih tersirat daripada tersurat, agar selaras dengan anjuran-anjuran liberalisme, *laissez faire*. Lynn H. Miller, *Agenda Politik Internasional*, Pent. Daryatno, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2006), hal 314-315.



Ide-ide post-kolonialisme mulai muncul seiring perkembangan politik etis yang ada dan muncul justru di Kerajaan Belanda. MC. Riklefs menyatakan, politik Etis berakar baik pada masalah kemanusiaan maupun pada keuntungan ekonomi.²⁴ Jika disikapi lebih lanjut, dengan disekolahkan para bumiputra, meski hanya sebagian dari mereka yang bisa sekolah, otomatis ide-ide dan pemikiran anak bangsa menjadi lebih terbuka. Mereka membaca pikiran-pikiran tidak hanya dari dalam saja. Interaksi pengetahuan ini berkembang pesat seiring disekolahkan putra-putra terpilih ke negeri Belanda. Ditambah, gerakan PAN Islamisme mulai bangkit di Timur Tengah. Perlu dianalisis sikap Belanda yang sedemikian lunak tidak lepas dari keadaan perang Eropa. Selain itu, dengan memanfaatkan tenaga bumiputra yang murah, maka ongkos perusahaan-perusahaan Belanda di Nusantara menjadi bisa ditekan. Tidak hanya perusahaan Belanda, banyak pihak asing yang kemudian bertarung di Indonesia. Hal inilah yang menjadi pertimbangan turut mendorong diambilnya kebijakan politik Etis.²⁵

Perkembangan selanjutnya, perlawanan yang ada menjadi lebih terorganisir, tidak sekedar mengandalkan fisik dan kontak senjata. Muncul organisasi-organisasi maupun serikat buruh yang kemudian sering melakukan mogok, rapat akbar, dan kegiatan yang semisal. Para tokoh nasionalis penggagas kemerdekaan melakukan kontak dengan tokoh-tokoh internasional dalam rangka memperkuat jaringan serta mendapatkan bantuan. Karena jika tidak demikian, langkah-langkah mereka akan mudah dipatahkan oleh pihak Belanda.

Gerakan berbau post-kolonialisme dapat tercermin dari banyaknya organisasi-organisasi yang muncul dalam meramalkan era tersebut. Budi Utomo, Trikorso Darmo, ISDV, SI, dan lainnya. Organisasi yang ada selain merupakan alat perjuangan, juga bentuk dialektika intelektual Nusantara dengan percaturan ideologi yang berputar kala itu. Tidak dapat dipungkiri pula bila hanya masih sebagian kecil masyarakat yang mampu berbahasa Belanda dan asing. Maka sangat wajar apabila hanya kaum terdidik yang bisa bergaul serta menyerap ide-ide dari luar untuk diserap dan diterapkan di Nusantara.²⁶

Puncak sikap dan kemunculan identitas nasional ditandai dengan adanya sumpah pemuda 28 Oktober 1928. Sumpah Pemuda secara politik, adalah bentuk kesadaran diri bila kaum bumiputera tidaklah dan tidak akan pernah sama dengan Belanda. Secara politik juga, itu memunculkan sikap anti penjajahan dan juga semangat multikultural. Karena sudah bisa menyatakan diri sebagai bangsa Indonesia.

²⁴ MC. Riklefs, *Sejarah Indonesia Modern*, ..., 227.

²⁵ MC. Riklefs, *Sejarah Indonesia Modern*, ..., 228. Takashi Shiraisi menjelaskan bila, munculnya politik modern di Hindia Belanda sebagai akibat pergeseran modal yang ada dan berakibat pada politik etis juga menjadi sebuah ancaman terhadap rezim kolonial. Takashi Shiraisi, *Madu dan Racun tentang kebangkitan nasional*, dalam, *menuju demokrasi politik indonesia dalam perspektif sejarah*, ed Baskara T. Wardaya, Jakarta:Gramedia, 133.

²⁶ Takashi Shiraisi, *Madu dan Racun tentang kebangkitan nasional*, dalam, *menuju demokrasi politik indonesia dalam perspektif sejarah*, ed Baskara T. Wardaya, ..., 136.



Dalam khazanah sastra, gerakan anti kolonialisme imperialisme juga muncul dalam berbagai bentuk. Semisal karya-karya pujangga baru yang coba mengkritik benturan budaya tersebut. Seperti Abdoel Moeis dalam *Salah Pilih*, ST Ali Syahbana dengan *Sebabnya Rafiah Tersesat dan Layar Berkembang*. Novel tetralogi Pulau Buru milik Pramoedya Ananta Toer juga sangat layak untuk masuk dalam khazanah post-kolonial mengingat, banyaknya pernyataan-pernyataan yang menegaskan sikap anti kolonialisme.

Angkatan 45 yang terkenal dengan revolusi berdarah dalam rangka menyatakan kemerdekaan bangsa-negara Indonesia juga sangat diwarnai oleh beberapa aspek multikultural dan semangat post kolonialisme. Slogan yang berbunyi *justice and freedom for all nation*, bamboe roentjing siaap mengoesir pendjadjah, beloem ada kedaoelatan selama belanda di indonesia, dll, adalah bentuk kata-kata yang biasa tertulis di ruang-ruang publik yang menandakan bahwa pada masa tersebut, semangat post kolonialisme begitu deras terasa. Berita kekalahan Jepang dalam PD 2 dimanfaatkan dengan baik. Dan kehadiran Belanda kembali ke Indonesia menimbulkan polemik berkepanjangan karena ada niatan Belanda ingin menguasai kembali Indonesia. Sehingga pertentangan yang ada kemudian adalah kesadaran sebagai sebuah bangsa dan negara baru melawan kaum penjajah yang pernah berkuasa. Semangat post kolonial dalam masa tersebut bisa dilihat dalam karakter kebangsaan yang berapi-api. Baik dalam puisi, prosa, maupun lagu-lagu perjuangan.

Barulah ketika KMB 49 selesai di Den Haag, Belanda mengakui kedaulatan Indonesia. Namun masalahnya, setelah lepas dari cengkeraman Belanda, para tokoh nasionalis melihat justru negara-negara maju dalam bentuk korporasi global mulai mendekati Indonesia dengan senyum manis mereka. Tan Malaka menyebutkan, persaingan ekonomi sesama kaum kapitalis menyebabkan timbulnya kongsi. Mereka dapat melawan musuh-musuhnya yang terpencil. Kalau kongsi dalam persaingan mati-matian tak dapat menaklukkan lawannya, ia mencoba mengadakan kompromi.²⁷ Lynn H. Miller menulis bila, Rezim ekonomi internasional yang muncul setelah perang dunia II sebenarnya tidak secara persis mencurahkan perhatian untuk menangani persoalan-persoalan yang dihadapi oleh apa yang kemudian disebut sebagai negara dunia ketiga, dengan warisan kemiskinan dan kurangnya perkembangan serta dampak ikutannya yang berupa kesenjangan yang kian melebar dari kesejahteraan hidup diantara penduduknya yang luar biasa besar dengan kondisi negara utara yang trus menumpuk kekayaannya. Tetapi sebaliknya, sistem internasional tersebut dibangun diatas beberapa asumsi umum, seringkali lebih tersirat daripada tersurat, agar selaras dengan anjuran-anjuran liberalisme, *laissez faire*.²⁸

Gerakan-gerakan yang digagas dalam masa Orde Lama, pada satu sisi adalah mencoba mendialektikakan prinsip-prinsip post-kolonialisme. Dengan menolak tegas

²⁷ Tan Malaka, *Menuju Merdeka 100%*,....., 62.

²⁸ Lynn H. Miller, *Agenda Politik Internasional*, Pent. Daryatno, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2006), hal 314-315.



campur tangan asing dalam intervensi masalah internal Indonesia. Keluar dari PBB, membentuk poros baru, sampai gerakan non blok yang mengindikasikan dan mengarahkan agar negara-negara bekas jajahan Eropa maupun Barat tidak terjebak dalam perang dingin yang tengah dilakukan oleh Amerika maupun Soviet. Mengingat perang dingin tidak lain adalah tarik menarik dan perebutan hegemoni pasca Perang Dunia 2.

Ruang budaya dalam masa-masa tersebut juga sangat diwarnai oleh ide-ide post kolonialisme. Seperti karangan Chairil Anwar, Mohtar Lubis, dan lain-lain. Hanya saja di penghujung Orde Lama, ide-ide post-kolonial menjadi melemah mengingat sebagai negara baru merdeka, Indonesia belum mampu mengatasi kontradiksi internal dengan baik. Hingga pada akhirnya, dalam sebuah peristiwa kelam dan sangat tertutup, Orde Lama tumbang.

Orde Baru dianggap sebagai manifestasi dari liberalisasi pasar dengan dibukanya investasi asing dalam berbagai hal. Salah satunya adalah tambang Free Port. Meski kemudian menjadikan ekonomi sebagai panglima dan membuat perencanaan jangka panjang, nyatanya perubahan masih belum merata dan hanya terpusat pada beberapa pihak. Penumpukan kesejahteraan dan akses ekonomi hanya pada segelintir pihak ini merupakan keadaan yang anti multikultural dan anti post-kolonial.

Jawa sebagai pusat Indonesia dianggap sebagai kelas yang paling baik dan paling mapan. Paradigma bila orang Jawa memiliki kelebihan dan budaya paling adiluhung dari budaya lain tercermin dalam penggunaan ungkapan yang bersifat nasional. Contohnya adalah slogan *Tut Wuri Handayani* dalam dunia pendidikan kala itu. Nilai positifnya, Orde Baru dengan seperangkat nilai dan organisasi taktisnya mampu membuat Indonesia untuk sementara tidak memiliki gejala berlebihan. Karena keragaman yang ada diikat dalam satu kepentingan. Dan bahasa yang digunakan adalah atas nama kepentingan bangsa dan negara.

Penyederhanaan masalah apabila terjadi konflik di masyarakat adalah dengan adanya klaim komunis. Tentu di era tersebut, trauma berkepanjangan akibat G 30 S tidak dapat dihindari. Namun yang perlu dipertanyakan kemudian adalah, setiap ada usaha-usaha untuk mengkritisi dan membuka kran demokrasi, maka istilah anti pancasila, sisa-sisa PKI, melekat erat pada tokoh maupun kelompok yang melakukannya. Ekonomi sebagai panglima yang dikumandangkan juga tidak bisa menembus seluruh lapisan masyarakat. Meski secara politik pemerintah kuat, namun dalam masa Orba, keadaan multikultural hanya sebagai simbol, dan semangat post kolonialisme stagnan. Karena dalam beberapa kasus dan fakta, banyak perusahaan asing yang justru mengeruk SDA Indonesia tanpa ada kompensasi yang jelas. Bahkan hutang luar negeri menunggak tanpa ada penyelesaian pasti.



Keadaan anti toleran yang menguat dan sporadis di Indonesia pasca reformasi terjadi bukan tanpa penyebab. Peta politik lokal, nasional, dan global turut mempengaruhinya. Masyarakat lokal (daerah) telah lama memendam rasa ketidakpuasan atas kebijakan-kebijakan yang diterapkan. Konflik tumpah ketika Orde Baru runtuh. Ada sebagian yang memendam luka lama karena merasa terpinggirkan.²⁹ Contohnya adalah Aceh dan Papua. Keduanya termasuk daerah yang berjasa dalam menambah devisa negara. Akan tetapi perlakuan dan kebijakan pemerintah pusat sama sekali kurang menyentuh keinginan dan harapan.

Situasi politik nasional juga dipenuhi oleh oligarki politik kelompok-kelompok yang menginginkan perubahan pemimpin. Tidak dapat dipungkiri, pernah terjadi penolakan atas terpilihnya kembali Presiden Soeharto dalam pemilu 1995. Selain Soeharto dipandang sangat militeristik, ia juga memiliki dosa kemanusiaan yang tidak sedikit. Ditambah ketidakberdayaan pemerintah menghadapi krisis ekonomi yang melanda beberapa negara, termasuk Indonesia.

Diperlukan wajah baru yang lebih tangguh untuk memimpin bangsa-negara Indonesia. Belum lagi permasalahan terpinggirkannya partai politik dalam pemerintahan Orde baru, membuat kanalisasi di wilayah nasional semakin meruncing.³⁰ Peta politik global juga berubah. Setelah kekalahan Rusia dalam perang dingin dengan Amerika menyebabkan dialektika antara kapitalisme dan sosialisme kini melebur menjadi satu. Mereka mencari musuh baru sebagai antitesa peradaban dan geliat Barat untuk berbenah. Barat memilih Islam sebagai lawan dengan mengangkat kembali isu-isu budaya sebagai pemicu konflik.³¹

Penting kemudian melihat perkembangan politik tersebut dengan perubahan dalam mekanisme pasar internasional. Dimana term dan pengertian globalisasi muncul. Perdagangan bebas, baik regional Asean, maupun perdagangan bebas antar benua. Ada kemungkinan juga bila konflik yang ada dalam negara-negara berkembang selama masa

²⁹ Relasi pusat dan daerah, sejak Indonesia merdeka mengalami dinamika yang beragam. Tidak dapat dipungkiri bila Ir. Soekarno melakukan beberapa kontrak politik dengan tokoh-tokoh yang dianggap penting di suatu daerah agar NKRI berdiri. Salah satunya dengan Aceh. Pergolakan sesama anak bangsa dalam masa kemerdekaan sering muncul. Karena ada beberapa pihak yang merasa kurang diperhatikan oleh pemerintah. Kemunculan DI/TII, Permesta, dan lain sebagainya. Hubungan yang kurang harmonis tersebut semakin melebar dan dalam ketika Orde Baru dengan kebijakan atau semboyan ekonomi sebagai panglima mengambil kendali pemerintahan. Gesekan-gesekan yang muncul menjadi lebih tajam karena pendekatan militeristik digunakan. Dan Soeharto sebagai tokoh militer sekaligus pemimpin Orde Baru menggunakan pendekatan tersebut untuk meredam gejolak yang menentang kebijakan pusat. Untuk lebih jelasnya bisa dibaca, Abdul Halim, *Politik Lokal: Pola, Aktor dan Alur Dramatisasinya (Perspektif Teori Powercube, modal dan Panggung)*, (Yogyakarta:LP2B, 2014), hal. 193.

³⁰ Pada tahun 1980n bermunculan gerakan-gerakan dakwah di kampus yang merupakan alternatif gerakan di bidang politik. Juga LSM sebagai bentuk kontrol terhadap pemerintahan. Gerakan komando dakwah dalam masa Orde Baru dianggap sebagai penyambung gerakan kelompok radikal Islam. Lihat Kuntowijoyo, "Transformasi Kehidupan Agama dan Organisasi Islam", dalam Kuntowijoyo, *Paradigma Islam: Interpretasi untuk Aksi*, ed. AE Priyatno, (Sleman:Tiara Wacana, cet.I, 2016), hal. 66-67.

³¹ Gema Martin Munoz, "Islam dan Barat: Sebuah Dualitas Internasional", dalam, John L. Esposito et.al, *Dialektika Peradaban: Modernisme Politik dan Budaya di Akhir Abad ke-20*, (Yogyakarta:Qalam, 2002), 3.



akhir abad 20 merupakan serangkaian konflik yang sengaja dikonstruksikan demi tujuan yang lebih besar. Yakni globalisasi. Pasar bebas.

Globalisasi sesuai dengan namanya diambil dari kata “globe” atau bola dunia. Artinya dengan adanya globalisasi tidak akan ada lagi batasan-batasan yang berupa jarak maupun wilayah yang dahulu membatasi pembangunan ekonomi, infrastruktur serta komunikasi antar negara. Globalisasi sering dikaitkan dengan “pasar bebas”. Kata-kata tersebut memang terdengar sangat menarik dan dipandang baik. Globalisasi sebenarnya tidak lebih dari evolusi dari kapitalisme yang kini telah mencakup wilayah dunia. Globalisasi ekonomi adalah kapitalisme global, dimana kekayaan dan jalannya produksi dikuasai oleh segelintir orang atau negara saja yang menentukan nasib hampir semua orang atau negara. Kapitalisme yang identik dengan eksploitasi juga terjadi di era ini. Dunia Ketiga yang menjadi obyek eksploitasi. Kekayaan alam dan sumber daya manusia dikeruk oleh negara kapitalis. Negara-negara Dunia Ketiga akan menjadi ladang bagi negara-negara kapitalis untuk memuaskan kerakusannya.

Untuk melancarkan penyebaran konsep globalisasi, Dunia Barat setidaknya telah banyak dibukakan jalannya oleh dua lembaga yang merupakan buah tangan Dunia Barat, yaitu IMF dan World Bank. Pada awalnya negara-negara maju akan menyebarkan konsep bagaimana negara itu seharusnya, dan negara-negara lain yang tidak sesuai konsep tersebut dianggap tertinggal dan harus ada perubahan. Ketika pemahaman ini telah merasuk, maka negara-negara tersebut akan berusaha untuk menjaga “gengsinya” agar bisa disebut sebagai negara maju menurut Dunia Barat. Negara-negara ini kemudian melakukan pembangunan secara masif yang didikte oleh konsep dari Dunia Barat, sehingga akan dibutuhkan modal yang sangat besar dalam pembangunan. Ketika modal dalam negeri sudah habis negara tersebut akan disodorkan pada modal asing yang bersumber dari IMF ataupun World Bank. Namun modal ataupun hutang modal tersebut tentu saja tidak tanpa syarat. Syarat-syarat yang disodorkan inilah yang kemudian menjadi inti “penjajahan” ini. Di saat negara berkembang tengah semangat -semangatnya untuk mengembangkan infrastruktur negara, mereka akan dipaksa untuk mau dieksploitasi kekayaan alam dan sumber daya manusianya dengan iming-iming hutang modal demi pembangunan. Dari sinilah dimulainya “penjajahan secara formal”, penjajahan dengan dasar perjanjian yang telah disepakati kedua negara.

Dewasa ini, ketergantungan negara berkembang terhadap modal untuk membangun merupakan sebuah alasan paling logis lembaga keuangan internasional tetap ada dan bisa melakukan intervensi di berbagai bidang. Negara maju tidak mungkin mau meminjamkan modal tanpa ada kompensasi maupun jaminan yang jelas. Dalam rangka membayar hutang pemerintah, kemudian beberapa subsidi dihilangkan.

Semangat multikultural dalam era ini begitu kentara. Mengingat ketika semakin luasnya akses informasi, kebebasan pers tidak terkendali, maka informasi menjadi semakin cepat diterima oleh siapapun. Berita yang muncul, pada satu sisi perlu dilihat apakah benar-benar terjadi, atau rekayasa politik (dalam kasus tertentu).



Semangat multikultural kembali diuji dengan adanya upaya-upaya separatis, disintegrasi, serta menggunakan semangat kesukuan ketika berbicara kepentingan negara. Contohnya adalah, bagaimana kasus dalam ruang politik kemudian melebar menjadi kasus agama dan berbau rasial (Pilkada Jakarta 2017). Padahal jika mau jujur, kepentingan yang ada hanyalah dalam ruang politik. Memang dalam kehidupan sehari-hari, peran agama di ruang lain begitu kentara. Namun dengan menggunakan ayat-ayat agama untuk memperkeruh keadaan, bukanlah sebuah solusi terbaik dalam kehidupan berbangsa bernegara yang disusun atas dasar kebhinnekaan.

Gerakan-gerakan post kolonialisme meredup kembali. Proses hibriditas dan kreolisasi dalam era globalisasi muncul dengan cepat. Orang-orang Indonesia misalnya, lebih bangga meniru dan berperilaku seperti Korea, Hollywood, maupun Bollywood. Rambut diwarnai pirang, karena dengannya merupakan simbol dan identitas kemajuan. Anak-anak tidak bangga dengan diri dan bangsanya. Karena telah terjadi konstruksi yang sifatnya massif dalam televisi serta hiburan. Dengan banyaknya tontonan yang mengunggulkan kebudayaan mereka. Padahal dalam film, lagu, dan sponsor produk asing, mereka tengah menyuguhkan sebuah produk. Mereka berjualan. Pemodal lagi yang diunggulkan dari semakin terbukanya sebuah bangsa dalam sistem globalisasi.

Semangat reformasi 1998 dengan kemudian setelah dua puluh tahun berjalan, menemui jalan buntu ketika berhadapan dengan globalisasi. Percepatan-percepatan di dalam teknologi komunikasi dan informasi membuat semakin cepat terhubungnya sebuah daerah dengan lainnya dalam hitungan detik. Maka dewasa ini, gagasan-gagasan multikulturalisme dan post kolonialisme menghadapi tantangan yang cukup berat untuk tetap eksis. Dan dalam membumikan ide-ide multikultural maupun post kolonialisme, dibutuhkan kerja keras serta banyaknya pihak yang terlibat di dalamnya. Agar api yang tengah mengecil ini tidak padam ditelan gelombang globalisasi.

Penutup

Tiga aspek multikultural yang perlu diperhatikan adalah, *Pertama* membangun sikap saling percaya (*mutual trust*). *Kedua* memahami konsep saling pengertian (*mutual understanding*). *Ketiga* menjunjung sikap saling menghargai (*mutual respect*). Ketiganya merupakan bangunan awal untuk dapat hidup dalam masyarakat yang heterogen. Terdiri dari banyak suku, agama, dan bahasa.

Studi post-kolonial dimaknai sebagai suatu perlawanan terhadap dominasi kolonialisme dan warisan kolonialisme. Post-kolonial bisa disederhanakan sebagai kritik lintas budaya sekaligus wacana yang ditimbulkannya. Tema yang dikaji juga luas dan beragam, meliputi kebudayaan, politik, agama, pendidikan, sejarah, antropologi, ekonomi, kesenian, etnisitas, bahasa, dan sastra, sekaligus bentuk praktik di lapangan. Seperti perbudakan, pendudukan, pemaksaan bahasa dan berbagai bentuk invasi lainnya. Dua kunci post-kolonialisme tentang budaya: *Pertama*, dominasi-subordinasi. *Kedua*, hibriditas dan kreolisasi.

Dialektika multikultural dan post-kolonialisme di Indonesia mengalami pasang surut. Hal mana terjadi dikarenakan banyak hal. Salah satunya justru berdasarkan



proses evolusi penjajahan yang dilakukan oleh pemodal itu sendiri. Dalam menjalankan praktik penjajahannya, kini mereka tidak berorientasi pada wilayah fisik semata. Namun mulai merambah ideologi, ekonomi, budaya. Dan melalui teknologi informasi dan komunikasi, konstruksi tersebut semakin halus serta tiada terasa bahwa dewasa ini, dengan penciptaan iklan, masyarakat digiring untuk memahami satu budaya melalui satu pintu. Yakni kapitalisme global.

Daftar Pustaka

- Baidawi, Zakiyudin, *Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural*, Jakarta: Erlangga, 2002.
- Baskara T., *Menuju Demokrasi Politik Indonesia dalam Perspektif Sejarah*, ed Baskara T. Wardaya, Jakarta: Gramedia, 2000.
- C. Kinloch, Graham, *Perkembangan dan Paradigma Utama Teori Sosiologi*, pent Dadang K. Ahmad, Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Halim, Abdul, *Politik Lokal: Pola, Aktor dan Alur Dramatisasinya (Perspektif Teori Powercube, modal dan Panggung)*, Yogyakarta: LP2B, 2014.
- H. Miller, Lynn, *Agenda Politik Internasional*, Pent. Daryatno, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- John L. Esposito et.al, *Dialektika Peradaban: Modernitas Budaya dan Politik di Akhir Abad 20*, Jakarta: Qalam, 2002.
- Kutha Ratna, Nyoman, *Postkolonialisme Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Kuntowijoyo, *Paradigma Islam: Interpretasi untuk Aksi*, ed. AE Priyatno, Sleman: Tiara Wacana, 2016.
- Lickona, Thomas, *Educating for Character*, Jakarta: Bumi Aksara, 2012.
- Patria, Nezar, dan Andi Arif, *Negara dan Hegemoni*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Simon, Roger, *Gagasan-Gagasan Politik Gramsci*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Tholchah Hasan, Muhammad, *Pendidikan Multikultural sebagai opsi penanggulangan radikalisme*, Malang: Unisma, 2016.
- Tan Malaka, *Menuju Merdeka 100%*, Jakarta: Narasi, 2014.
- Tilaar, H.A.R., *Multikulturalisme Tantangan-tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional*, Jakarta: Grasindo, 2004.
- Veeger, K.J., *Realitas Sosial: refleksi filsafat sosial atas hubungan individu-masyarakat dalam cakrawala sejarah sosiologi*, Jakarta: Gramedia Pustaka, 1992.
- Walder, Dennis, *A Handbook to Literary Research*, France: The Open University, 2005.
- Yusuf Lubis, Akhyar, *Deskonstruksi Epistemologi Modern*, Jakarta: Pustaka Indonesia Satu, 2006.
- Tim, Jurnal Fikratuna Volume 6, Nomor 2, Juli-Desember, 2014.
- Alfa Sayyidah, *Postkolonialisme*, dalam,
<http://alfasayyidah.postkolonialisme.makalah.http>, diakses Januari 2018.
- <http://mohkusrarto.wordpress.com/masyarakat-multikulturalisme/> (7 Mei 2016)